



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 10 Desember 2021

Halaman: 2

## PPKM LEVEL 3 NATARU DIBATALKAN

# Sultan Berharap Mobilitas Warga Diiringi Prokes

**YOGYA (MERAPI)** - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pembatalan PPKM level 3 saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 membuat masyarakat tetap bisa melakukan mobilitas. Meski begitu, Sultan meminta agar warga tetap disiplin protokol kesehatan Covid-19.

"Berarti warga dimungkinkan untuk melakukan mobilitas tapi tetap menjaga protokol kesehatan," ujar Sultan di Kantor Gubernur DIY, Kamis (9/12).

Sultan menyatakan meski PPKM level 3 saat Nataru dibatalkan, masyarakat diharapkan punya kesadaran menjaga diri terutama di tempat yang memungkinkan terjadi kerumunan. "Dalam arti pembatasan-pembatasan itu relatif, lebih bebas dibandingkan level 3 jadi kita berharap pada masyarakat bagaimana mereka sendiri punya kesadaran yang lebih baik di dalam menjaga kalau dia mau berkunjung ke tempat wisata, mall, restoran dan sebagainya yang kemungkinan itu banyak orang lain di dalam," jelasnya.

Dengan memiliki kesadaran terhadap protokol kesehatan, Sultan berharap penularan Covid-19 di Yogya dapat berku-

rang dan lebih terkendali.

"Bagaimana (masyarakat) bisa menempatkan diri untuk punya jarak dan sebagainya sehingga mengurangi kemungkinan penularan dan sebagainya," imbuh Sultan.

Sultan meminta agar warga tidak hanya berharap pada kebijakan pemerintah saja, namun memiliki kesadaran untuk menjadi subjek dalam pengendalian virus dengan disiplin protokol kesehatan.

"Jangan hanya berharap pada kebijakan pemerintah daerah tapi masyarakat seandainya sendiri. Masyarakat justru dengan tidak dilakukannya level 3 itu harapan saya kesadaran untuk menjaga dirinya menghindari kerumunan, menghindari tempat-tempat yang kira-kira membahayakan kesehatannya ya jangan dilakukan," paparnya.

Terlebih, Sultan juga menyebutkan dan memprediksi tentu

akan ada banyak pendatang atau wisatawan dari luar Yogya yang akan berkunjung saat libur Nataru.

"Jadi kesadaran itu dituntut kepada warga masyarakat karena nanti pendatang juga akan banyak yang masuk tempat-tempat wisata, nginep di Yogya," ujar Sultan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta mengatakan pembatalan PPKM level 3 saat Nataru merupakan kewenangan pemerintah pusat yang harus dipatuhi.

"Pembatalan PPKM kewenangan pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangannya. Tentunya DIY ikut kebijakan itu, meskipun bukan berarti saat ini sudah aman," ujar Huda.

Meski patuh terhadap kebijakan pusat, Huda menyebut tidak boleh lengah sebab pembatalan PPKM level 3 saat Nataru justru harus diimbangi



Gubernur DIY Sri Sultan HB X memberikan keterangan kepada media.

pengetatan protokol kesehatan. "Pembatalan PPKM level 3 bukan berarti memperlonggar protokol kesehatan. Justru harus diimbangi dengan pengetatan prokes. Kalau pembatasan dilonggarkan maka prokes harus dketatkan itu agar seimbang dan memperkecil potensi penularan," jelasnya.

Huda menjelaskan dalam rapat koordinasi bersama Forkompinda menghadapi liburan Nataru, disampaikan bahwa

DIY merupakan tujuan destinasi ketiga secara nasional setelah Jateng dan DKI Jakarta.

Padahal luas wilayahnya sangat kecil dibandingkan dengan daerah lain. Artinya jumlah wisatawan akan sangat padat. Di situlah perlu pengetatan protokol kesehatan.

"Kita sudah belajar, kenaikan kasus itu lebih mudah dibandingkan menurunkan kasusnya," ujar Huda.

(C-4)-d

| Instansi           | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|--------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. BPBD            |              |       |                 |

Yogyakarta, 13 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005